BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kreativitas manusia yang dihasilkan melalui ide dan pikiran termasuk bagian dari kekayaan intelektual. Saat kreativitas manusia ditujukan sebagai komersial, timbul pemikiran untuk memberi penghargaan khusus pada karya tersebut. Perfilman di Indonesia adalah wujud dukungan dalam penggunaan media elektronik dan pemanfaatan atas perkembangan kehidupan modern. Kegiatan perfilman pada konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F.¹

Zaman dahulu ketika perilisan film baru ditayangkan pada layar lebar, orang-orang yang ingin menonton film akan pergi membeli tiket. Sekarang masyarakat lebih memilih untuk menunggu penayangan film baru hingga tersedia versi bajakannya yang dapat diunduh melalui situs ilegal. Pembajakan film dalam era digitalisasi mulai muncul pada akhir tahun 1990-an dan berkembang hingga awal tahun 2000-an.² Seiring meluasnya akses internet broadband serta kemunculan platform berbagi file, penyebaran film bajakan jauh lebih mudah, cepat dan berskala besar. Dengan kemajuan teknologi maka pelaku dapat membuat situs ilegal melalui jaringan internet.

¹ Pratama, Deni Rahman dan Ardoni. "Pembuatan Film Animasi Sebagai Media Pendidikan Literasi Bagi Anak Sekolah Dasar", Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan FBS Universitas Negeri Padang, Vol. 7, No. 2 Desember 2018, hal. 3

² Manish Jindal, "*History of Movie Piracy – Nuanced Explanation*".

<https://bytescare.com/blog/history-of-movie-piracy> diakses pada 9 Mar 2025

Pembajak film dapat terjadi akibat pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga secara sengaja menyebarkan dan/atau menyimpan film dalam beberapa bentuk *file* MP4, *Audio Video Interleave* (AVI), *Matroska Video* (MKV), dan lainnya. Melalui kecanggihan teknologi pelaku juga dapat menyalin film dari aslinya dengan kualitas baik. Pelaku kemudian meng-*upload* ke situs ilegal melalui jaringan internet. Pelaku yang mempublikasikan film tanpa seizin pihak pencipta akan memberi kerugian hak ekonomi pencipta, karena masyarakat yang ingin menonton film tertentu akan mengakses ke situs ilegal tersebut. Hanya dengan mendownload melalui situs ilegal secara gratis tanpa bayar. Beberapa kualitas film yang umumnya dapat ditemukan pada situs ilegal seperti *cam*, *HDTV*, *WEB-DL*, dan *Blu-ray*.³

Karya film adalah suatu karya seni sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (selanjutnya disebut sebagai UU Perfilman). Film yang termasuk dalam karya seni juga memiliki hak cipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai UU Hak Cipta) Pasal 40 Ayat 1 huruf m, bahwa film merupakan salah satu jenis ciptaan yang memperoleh perlindungan hak cipta.⁴

UU Hak Cipta mencakup hak moral yang diatur pada Pasal 5 dan hak ekonomi pada Pasal 9. Pelanggaran hak cipta diancam dengan sanksi pidana diatur dalam Pasal 113 UU Hak Cipta. Dimana apabila pelaku dengan sengaja

³ Dikdik Saparudin, "Urutan Kualitas Film di Situs Download yang Perlu Diketahui". <https://carisinyal.com/urutan-kualitas-film-di-situs-download/2/>, diakses pada 17 Mei 2022

⁴ Pasal 1 ayat 1 UU Perfilman

menggandakan, mendistribusikan, atau menyiarkan suatu ciptaan tanpa izin pencipta, maka dapat dikenakan pidana penjara dan denda. Pasal 43 huruf d pada UU Hak Cipta menerangkan tindakan yang tidak dilarang adalah perbuatan dan penyebaran hak cipta namun tidak bersifat komersil serta memperoleh persetujuan pencipta. Meskipun terdapat ketentuan hukum yang melarang pembajakan, kenyataannya praktik ini masih marak terjadi di Indonesia.⁵

Tantangan bagi industri perfilman yakni meningkatkan permintaan dan minat film bajakan. Indonesia sendiri termasuk kategori negara permintaan tertinggi pada produk bajakan. Diketahui masyarakat Indonesia sering mengakses film bajakan nasional dan internasional berdasarkan data Joe Welch dari *Public Policy 21th Century Fox*.⁶ Hal ini juga memberi dampak bagi industri perfilman tanah air dengan menurunnya kualitas industri akibat permintaan film bajakan yang berbanding terbalik dari produk asli. Dampak lainnya tanpa disadari kurangnya apresiasi dan kualitas perfilman di Indonesia.⁷

Berdasarkan survei YouGov dan *Coalition Against Piracy (CAP)*, pengguna Indonesia mengakses situs ilegal sebanyak 63% diantaranya ada

⁵ Sukihana, Ida Ayu dan I Gede Agus Kurniawan, “Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7, No. 1 Mei 2018, hal. 7

⁶ Endro Priherdityo, “Pemerintah Belum Punya Strategi Perangi Pembajakan”. https://www.kominfo.go.id/content/detail/4941/pemerintah-belum-punya-strategi-perangi-pembajakan/0/sorotan_media, diakses pada 20 Mei 2022

⁷ Ibid.

situs IndoXXI yang populer digunakan.⁸ Dengan mengakses situs ilegal, pengguna dapat menghindari streaming berbayar untuk menonton film. Survei yang dilakukan *Coalition Against Piracy (CAP)* pada tanggal 19 s.d 20 September 2019 menemukan pengguna streaming film bajakan dengan rentang usia sekitar 18-24 tahun. Sebanyak 62% pengguna membatalkan langganan streaming berbayar karena beralih ke situs ilegal. Anggota *Video Coalition of Indonesia (VCI)* yang tergabung dalam *Coalition Against Piracy (CAP)* terdiri dari Catchplay, SuperSoccerTV, Rewind, Viu, iflix, HOOQ, Cinemaxx, CGV, Cinema21 Group, Telkom Indonesia, Viva Group, MNC Group, Emtek Group, GPBSI, APROFI, dan APFI mendukung perlawanan pembajakan film melalui kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Tujuan kerja sama antara anggota VCI dan Kominfo adalah mengidentifikasi dan memblokir domain yang berkaitan dengan pembajakan di situs ilegal.⁹

Pembajakan yang berdampak pada industri perfilman Indonesia, terutama ketika masa pandemi Covid-19 pengguna film bajakan semakin meningkat. Pendapatan industri perfilman menurun 97% pada tahun 2020, faktor penurunan tersebut didorong dengan kebijakan pemerintah seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mewajibkan masyarakat untuk membatasi mobilitas termasuk penutupan bioskop agar menekan peningkatan

⁸ Agus Tri Haryanto, "Survei: Mayoritas Konsumen Online RI Doyan Film Bajakan IndoXXI". <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4833471/survei-mayoritas-konsumen-online-ri-doyan-film-bajakan-indoxxi>, diakses pada 23 Mei 2022

⁹ Ibid.

kasus Covid-19 di Indonesia. Mengingat industri perfilman rata-rata memperoleh 90% pendapatan dari penjualan tiket.¹⁰ Kebutuhan hiburan pada saat pemberlakuan pembatasan sosial serta daya beli yang menurun menyebabkan masyarakat mengincar layanan streaming.

Sebelum pandemi Covid-19 pembajakan telah banyak mengakibatkan kerugian pada industri film. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi industri perfilman, mengingat banyaknya orang yang bergantung dengan industri film. Industri perfilman juga berpartisipasi pada pemasukan negara melalui pajak produksi dan pendistribusian film. Berdasarkan laporan dari *Pirates in the Outfield, Akamai 2022 State of the Internet/Security Report*, dimana adanya kerja sama antara MUSO dan Akamai dalam mempersiapkan data aktivitas pembajakan streaming pada beberapa industri serta mempertegas permasalahan pembajakan konten digital. Ditemukan sebanyak 3,7 miliar permintaan pembajakan dari Januari s.d. September 2021 berdasarkan data pengunjung yang mengakses situs untuk menonton film/acara televisi, termasuk pengunduhan *torrent*. *Torrent* adalah layanan yang dapat menyimpan dan mengunggah berbagai jenis file melalui file client seperti *BitTorrent*, *UTorrent*, dan lainnya. Dengan *torrent* pengunggah dapat menyimpan alamat file dalam jangka waktu yang lama, sehingga dapat langsung digunakan saat diperlukan.¹¹

¹⁰ Ali Hakim, "Di Balik Layar: Bagaimana Pembajakan Digital Melukai Industri Film Indonesia". <https://tekno.kompas.com/read/2022/03/09/10020057/di-balik-layar-bagaimana-pembajakan-digital-melukai-industri-film-indonesia?page=all> diakses pada 30 Mei 2022

¹¹ Ibid.

Berdasarkan laporan tersebut, terdapat 61,5 persen pengguna yang mengakses produk bajakan secara langsung.¹² Beberapa negara yang termasuk kedalam lima peringkat teratas untuk pengunjungan film bajakan di situs ilegal, diantaranya Amerika Serikat (13,5 miliar), Rusia (7,2 miliar), India (6,5 miliar), China (5,9 miliar), Brasil (4,5 miliar). Negara Indonesia menduduki peringkat ke-9 pada daftar kunjungan akses film bajakan di situs ilegal yakni sebanyak 3,5 miliar kunjungan. Tahun 2021 jumlah penonton film nasional hanya mencapai 1,7 juta penonton, perbandingan besar dengan jumlah penonton pada tahun 2020 yang dapat mencapai 18 juta penonton. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung film nasional dengan menonton secara ilegal. Upaya pemerintah dalam memberantas pembajakan film melalui pemblokiran berbagai situs ilegal tidak memberi efek jera kepada para pelaku.¹³

Banyaknya kasus pembajakan film juga terjadi di wilayah negara Amerika. Adapun upaya Amerika dalam menangani pembajakan dengan mencari alamat IP/jaringan/smartphone pengguna yang mengakses situs ilegal, kemudian melayangkan surat sebagai peringatan agar pengguna berhenti mengakses situs streaming ilegal. Jika diketahui masih aktif mengakses situs ilegal, maka pemerintah akan menonaktifkan nomor HP dan jaringan internet pengguna.¹⁴ Apabila Indonesia menerapkan kebijakan sanksi

¹² Yanwa Evia Java, "Lepas Perfilman Indonesia dari Cekikan Parasit bernama Pembajakan". <https://www.its.ac.id/news/2022/03/30/lepas-perfilman-indonesia-dari-cekikan-parasit-bernama-pembajakan>, diakses pada 17 Mei 2022

¹³ Ibid.

¹⁴ Redaksi, "Keseriusan WeTV Memerangi Kasus Pembajakan Film di Indonesia".

seperti yang diterapkan Amerika bagi pelanggar hak cipta pada kasus pembajakan film, pasti dapat menekan angka kejahatan pembajakan film karena masyarakat takut Kartu Tanda Penduduk-nya akan dimasukkan kedalam daftar hitam. Mengingat nomor kartu SIM didaftarkan dengan Kartu Tanda Penduduk masyarakat, pengguna WiFi juga dihubungkan ke alamat tertentu sehingga harus dihentikan akses jaringan internetnya agar tidak dapat mengakses film bajakan. Sebaliknya jika penutupan situs ilegal dilakukan, situs ilegal lainnya akan terus bermunculan.¹⁵

Proses pembuatan film yang membutuhkan modal dalam mendukung karya sinematografi seorang produsen, baik modal dalam bentuk sumber energi alam, sumber energi manusia (aktor/aktris), ilmu pengetahuan, teknologi dan biaya.¹⁶ Sehingga hal tersebut dapat merebut hak royalti atau keuntungan yang seharusnya menjadi hak dari pemilik hak cipta. Maka sudah seharusnya pemerintah dan negara memberikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk mengapresiasi/menghargai pembuatan sebuah karya cipta seseorang, dengan mengeluarkan UU Hak Cipta agar dapat memperoleh upaya penyelesaian perkara pembajakan film secara hukum. Namun pembajakan film tidak berakhir begitu saja, masih ada kasus pembajakan film yang dilakukan baik diduplikasi, diubah, serta nyaris tidak dapat dibedakan dari aslinya. Tindakan pembajakan film sering dilakukan meskipun sudah

<https://www.sinarharapan.net/keseriusan-wetv-memerangi-kasus-pembajakan-film-di-indonesia>, diakses pada 18 Mei 2022

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Masha Kazantseva, “*Expert Insights and Essential Steps for Film Budgeting 101*”.
<https://rentman.io/blog/film-production-budget>, diakses pada 20 Mei 2022

dilarang oleh pemerintah karena berbagai faktor yang mendorong perilaku ini, baik dari sisi pelaku maupun konsumen.

Salah satu kasus pembajakan film yang menjadi perhatian pada beberapa tahun lalu adalah pembajakan film Keluarga Cemara. Berdasarkan Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN-Jmb, terdakwa Aditya Fernando Phasyah didakwa melanggar UU Hak Cipta karena telah mengunggah film-film tanpa izin di platform streaming ilegal yakni DUNIAFILM21. Aditya bekerjasama dengan Robby Bhakti Pratama (belum tertangkap) untuk mempublikasikan 3.000 film, diantaranya termasuk karya film milik PT Visinema Pictures seperti Keluarga Cemara dan Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Film tersebut bisa diakses secara gratis. Terdakwa Aditya mendapat keuntungan dari penjualan iklan di situs DUNIAFILM21 dengan tarif iklan yang berbeda.¹⁷

Pelaku pembajakan film mayoritas beroperasi di luar negeri, sehingga tidak mudah di tangkap seperti pelaku Robby Bhakti Pratama. Hal ini menjadi permasalahan yang sering ditemukan, oleh karena itu pemerintah perlu mengambil langkah dalam upaya untuk menangani pembajakan film tanah air. Umumnya pemerintah melakukan penutupan situs-situs streaming ilegal agar masyarakat tidak dapat mengakses situs tersebut dan beralih ke platform streaming legal. Namun sebuah situs yang diblokir bisa kembali

¹⁷ Pengadilan Negeri Jambi, Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN Jmb, 2021, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> pada 22 Mei 2022

dengan mudah, mereka akan muncul menggunakan nama domain yang berbeda.¹⁸

Pemblokiran situs ilegal adalah salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam menekan angka pembajakan film di Indonesia. Namun cara ini belum sepenuhnya efektif, karena situs ilegal dapat dengan mudah berpindah domain atau menggunakan teknologi lain untuk menghindari pemblokiran. Meskipun demikian pemblokiran tetap mempunyai dampak positif, salah satunya adalah memberi edukasi kepada masyarakat dan sebagai peringatan bagi pelaku pembajakan.¹⁹

Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sangat penting dalam mengawasi pergerakan situs ilegal serta menegakkan sanksi hukum bagi pelaku yang melanggar hak cipta. Masyarakat juga perlu mendapatkan pengetahuan lebih dalam mengenai hak kekayaan intelektual, termasuk risiko keamanan siber yang dapat ditimbulkan saat mengakses situs ilegal, seperti pencurian data atau ancaman *malware*. Adapun perangkat media yang apabila terkena virus dapat dikendalikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, tindakan yang mungkin saja dilakukan seperti mengaktifkan fitur kamera pada komputer atau laptop kemudian merekam semua aktivitas pengguna film bajakan tanpa diketahui.²⁰

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Mochamad Januar Rizki, "Ini Capaian Kominfo Blokir Konten Bajakan dan Website Fintech Ilegal". <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-capaian-kominfo-blokir-konten-bajakan-dan-website-fintech-ilegal-lt5e184db82520e>, diakses pada 25 Februari 2025

²⁰ Lukas Noonan, "The Cyber Security Risks of Online Streaming". <https://www.metacompliance.com/blog/cyber-security-awareness/cyber-risks-of-online-streaming>, diakses pada 25 Februari 2025

Banyak pengguna internet yang sebenarnya telah menyadari dampak negatif dari mengakses situs ilegal, baik dari sisi hukum maupun risiko terhadap perangkat mereka. Namun kesadaran ini tidak selalu diiringi dengan kepatuhan, karena sebagian masyarakat menganggap bahwa mereka dapat mengakses film bajakan. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menegakkan hak kekayaan intelektual perlu didukung oleh peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat. Apabila masyarakat masih memilih untuk mengakses atau melakukan streaming melalui situs ilegal, maka pembajakan film akan tetap terjadi karena adanya permintaan yang tinggi.²¹

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul “*Analisis Pelanggaran Hak Cipta Akibat Tindakan Pembajakan Film Oleh Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab (Kasus Film Keluarga Cemara)*”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, beberapa hal yang menjadi rumusan permasalahan adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum hak cipta terhadap pembajakan film di Indonesia?

²¹ Dian Utami Amalia, *et.all*, “Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia”, *Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1 Maret 2024, hal. 35

2. Bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri dalam penegakan hak cipta terhadap pembajakan film berdasarkan studi Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN-Jmb?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian pada penulisan ini adalah:

1. Mempelajari sistem perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam kasus pembajakan film di Indonesia.
2. Mengkaji pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri dalam penegakan hak cipta terhadap pembajakan film berdasarkan studi Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN-Jmb.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk memperbaharui regulasi penegakan hukum sehingga seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem pembajakan film dapat ditindak.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi pada penelitian hukum hak cipta, khususnya mengenai pelanggaran hak cipta dengan teori perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap karya sinematografi di Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pembajakan film terjadi, faktor-faktor penyebabnya, serta implikasi hukum dari pembajakan tersebut.

3. Manfaat lain dari penelitian ini agar dapat membantu mengidentifikasi celah dalam regulasi dan penegakan hukum hak cipta di Indonesia, serta memberikan saran untuk perbaikan.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Melalui penelitian ini penulis dapat memberikan wawasan kepada para pembuat film mengenai risiko pelanggaran hak cipta dan cara melindungi karya mereka secara lebih efektif.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang pentingnya menghormati hak cipta dan dampak negatif pembajakan terhadap industri kreatif, khususnya perfilman.
3. Menjadi bahan rujukan bagi pemerintah untuk merumuskan regulasi yang lebih baik dan memperketat penegakan hukum terkait hak cipta, terutama dalam era digital.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian disusun agar mempermudah analisis permasalahan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori yang berkaitan dengan penelitian mulai dari Perlindungan Hukum UU Hak Cipta, Jenis Pembajakan Film,

Hak Cipta dalam Industri Film, dan Mekanisme Penegakan Hukum
Hak Cipta di Indonesia.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis data, cara pengumpulan data, jenis pendekatan, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini membahas hasil penelitian dari rumusan masalah yang memuat penegakan hukum hak cipta terhadap pembajakan film di Indonesia dan pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri dalam penegakan hak cipta terhadap pembajakan film berdasarkan studi Putusan Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN-Jmb.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat hasil rangkuman dari penemuan analisis data yang dilakukan peneliti pada Bab 1-4 dan memberi masukan untuk dipertimbangkan kembali berdasarkan penelitian ini.